

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
PENANGANAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN BPJS
KESEHATAN OLEH BADANUSAHA DI KABUPATEN
BULELENG**

Oleh

Ni Putu Rina Astiningthyas, NIM 2014101095

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menginvestigasi dan menganalisis bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menangani tunggakan BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng, serta (2) untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menyelesaikan perkara tunggakan BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Singaraja. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen, observasi, dan wawancara. Penentuan sampel menggunakan Teknik *Non Probability Sampling* dengan penentuan subyek melalui Teknik *Purposive Sampling*. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi peran JPN belum terimplementasikan dengan baik karena pihak BPJS Kesehatan yang kurang tanggap dalam memberikan informasi terkait tunggakan yang sudah dialami oleh pihak Badan Usaha, serta terdapat badan usaha yang dengan sengaja melakukan penunggakan. (2) Adapun kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha sangat bervariasi. Faktor internal bahwa BPJS Kesehatan tidak segera memberikan informasi terkait penunggakan yang sudah melewati tenggat pembayaran dan pihak BPJS yang enggan untuk membawa perkara tunggakan iuran yang dilakukan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng ke jalur litigasi. Faktor eksternal bahwa terdapat kesengajaan dari pihak Badan Usaha melakukan penunggakan pembayaran iuran kesehatan pekerjanya dengan berbagai alasan dan terdapat masalah dari internal badan usaha sehingga tidak membayarkan iuran kesehatan pekerjanya.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Badan Usaha, BPJS Kesehatan, Tunggakan, Kabupaten Buleleng

**THE ROLE OF THE STATE ATTORNEY IN HANDLING
ARRANGEMENTS IN BPJS HEALTH PAYMENTS BY
BUSINESSENTITIES IN BULELENG DISTRICT**

By

Ni Putu Rina Astiningthyas, NIM 2014101095

Department of Law and Citizenship

ABSTRACT

This study aims (1) to investigate and analyze the role of the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara - JPN) of the Buleleng District Prosecutor's Office in handling overdue BPJS Health payments by Businesses in Buleleng District, and (2) to identify the obstacles faced by the State Attorney (JPN) of the Buleleng District Prosecutor's Office in resolving cases of overdue BPJS Health payments by Businesses in Buleleng District. This research is of empirical legal nature with a descriptive approach. The research location is conducted at the Singaraja District Prosecutor's Office. Data collection methods include document studies, observation, and interviews. Sample determination uses Non-Probability Sampling Technique with subject determination through Purposive Sampling Technique. The collected data are analyzed qualitatively. The research findings indicate that (1) the implementation of the JPN's role has not been effectively executed due to the lack of responsiveness from BPJS Health in providing information regarding overdue payments experienced by Businesses, and there are businesses intentionally delaying payments. (2) The obstacles faced by the State Attorney in handling overdue BPJS Health payments by Businesses vary greatly. Internal factors include BPJS Health's failure to promptly provide information on overdue payments exceeding the payment deadline and BPJS's reluctance to litigate overdue premium payment cases by Businesses in Buleleng District. External factors include intentional delays by Businesses in paying health insurance premiums for their employees citing various reasons and internal business issues resulting in failure to pay health insurance premiums for their employees.

Keywords: *State Attorney, Business Entity, BPJS Health, Arrears, Buleleng Regency*